



# Politik Bisnis Internasional

**Bob Sugeng Hadiwinata, Ph.D.**

Kata Pengantar: Mohtar Mas'ood

30-7-15

# Politik Bisnis Internasional

No. Kelas 382.1 HAD p .....  
No. Induk 139752 Tgl 23-7-15 .....  
~~Hadiah/Beli~~ .....  
Dari Kanisius .....



# Politik Bisnis Internasional

**Bob Sugeng Hadiwinata, Ph.D.**

Kata Pengantar:  
Mohtar Mas'ood



382.1  
HAD  
P

139752 - R / FISIP  
23.7.15



Penerbit Kanisius

## **Politik Bisnis Internasional**

027838

© Kanisius 2002

PENERBIT KANISIUS (Anggota IKAPI)

Jl. Cempaka 9, Deresan, Yogyakarta 55281

Kotak Pos 1125/Yk, Yogyakarta 55011

Telepon (0274) 588783, 565996; Fax (0274) 563349

Website: [www.kanisiusmedia.com](http://www.kanisiusmedia.com)

E-mail : [office@kanisiusmedia.com](mailto:office@kanisiusmedia.com)

Cetakan ke- 5      4      3

Tahun            13      12      11

**ISBN 979-21-0097-0**

### **Hak cipta dilindungi undang-undang**

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari Penerbit

# KATA PENGANTAR

## KAPITAL GLOBAL DAN PEMBANGUNAN NASIONAL

### Cita-Cita

Paling tidak ada tiga ideal yang mendasari pemikiran para Bapak Pendiri negeri ini ketika mereka memperjuangkan kemerdekaan. Mereka ingin agar kemerdekaan itu bisa mendatangkan kemakmuran kepada rakyat yang sudah ratusan tahun menderita kekurangan akibat tata kehidupan yang menindas. Tetapi kemakmuran itu mesti diusahakan dengan cara yang bisa melibatkan keikutsertaan dan kesepakatan seluruh rakyat serta tidak membuat mereka menjadi bangsa terjajah kembali. Tiga nilai itu, yaitu kemakmuran ekonomi, demokrasi, dan kemerdekaan nasional; berulang-ulang muncul dalam wacana yang berlangsung di antara para pemimpin yang melahirkan Indonesia. Ketika untuk mencapai tujuan itu kita harus melibatkan diri dalam jaringan hubungan antar-bangsa, prinsip yang dianjurkan sangat jelas:

*" . . . pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri." (Hatta, 1988: 13).*

Namun, walaupun tema "ideal-politik", seperti kemerdekaan dan otonomi nasional sangat menonjol dalam wacana itu, kesadaran akan keharusan mempertimbangkan "riil-politik" juga tampak jelas. Seperti disampaikan oleh Mohammad Hatta, waktu itu sebagai kepala pemerintahan, berjuang atas kesanggupan sendiri tidak berarti:

*"tidak akan mengambil keuntungan daripada pergolakan politik internasional .... (T)iap-tiap politik untuk mencapai kedudukan negara yang kuat ialah mempergunakan pertentangan internasional yang ada untuk mencapai tujuan nasional sendiri .... (P)erjuangan bangsa ... hendaknya didasarkan pada realitas .... (P)olitik internasional tidak bisa dihadapi dengan sentimen belaka, tetapi dengan realitas dan dengan logika yang rasional". (Hatta, 1988:13 - 14).*

Selanjutnya, agar mampu menahan guncangan akibat dinamika dalam arena politik dunia, bahtera Republik Indonesia itu harus memiliki "ballast" yang kuat berwujud solidaritas nasional dan wawasan kebangsaan yang utuh dan teguh.

Semangat itulah yang, paling tidak dalam retorika para pemimpin kita, sejak lama mengilhami dan menuntun perilaku para pemimpin kita. Namun, siapa pun pasti menyadari bahwa yang dihadapi Indonesia bukan ruang kosong yang bisa kita bentuk sesuai dengan keinginan kita. Di "luar sana" sudah ada arena yang terbentuk jauh sebelum Republik ini lahir. Dalam arena itu sudah terdapat berbagai pemain dengan beragam kepentingan. Aturan main yang dipakai dalam arena itu sudah terbentuk melalui pergulatan di antara para pemain. Dengan kata lain, perilaku eksternal Indonesia dihadapkan pada kendala berupa tatanan atau tertib hubungan yang sering kali lebih mampu membentuk perilaku kita daripada sebaliknya.

Uraian pendek ini bermaksud memperbincangkan pengalaman Indonesia dalam menangani persoalan seperti itu sejak 1970-an. Fokusnya adalah pada konteks global yang dihadapi oleh para pemimpin Indonesia ketika memperjuangkan agenda kerja nasionalnya. Karena itu, sesudah membahas agenda itu secara ringkas, analisis akan dipusatkan pada upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok berikut: Bagaimana bentuk dan sifat tatanan hubungan global yang dihadapi pemerintah Indonesia? Kesempatan apa yang diberikannya, dan gangguan apa yang diakibatkannya, pada upaya pencapaian cita-cita kebangsaan Indonesia? Akomodasi apa yang dilakukan oleh pemerintah itu? Apa akibatnya pada otonomi nasional? Adakah kemungkinan lain?

Secara konseptual, pemerintah Indonesia bisa digambarkan sebagai aktor yang harus menghadapi dua lingkungan kebijakan, domestik dan internasional, yang di dalamnya terdapat pelbagai aktor dengan berbagai kepentingan, terutama politik dan ekonomi. Berdasarkan perspektif ini, perilaku eksternal pemerintah dianggap mencerminkan pergulatannya dalam menangani tuntutan dan desakan yang muncul dari kedua lingkungan tersebut. Pemerintah memang punya kepentingan yang didefinisikannya sendiri dan selalu berusaha mengejar

kepentingan itu, namun demi kelestariannya sendiri ia harus memperhitungkan kendala dan desakan yang datang dari kelompok-kelompok kepentingan utama dalam masyarakatnya sendiri maupun kekuatan-kekuatan dominan dalam arena internasional.

Baik sebagai perwujudan dari prakarsanya sendiri sebagai aktor yang secara *de jure* otonom maupun sebagai tindakan yang muncul sebagai tanggapan terhadap tuntutan lingkungan yang melingkupinya, politik luar negeri suatu pemerintah tidak hanya dituntun oleh nilai-nilai normatif tetapi juga, atau justru lebih banyak ditentukan, oleh kepentingan materiil. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip ideologis yang diyakini sebagai benar oleh para pejabat pemerintahan, seperti wawasan kebangsaan, memang mempengaruhi tindakan politik luar negeri suatu negara, namun yang pengaruhnya jauh lebih efektif adalah pertimbangan kepentingan, terutama kepentingan materiil yang berkaitan dengan pelestarian sistem yang dikelola para pejabat itu maupun posisi kekuasaan pengelolanya. Dalam kaitan dengan kepentingan itu, yang sangat relevan untuk diperhatikan adalah adanya keharusan struktural pada hampir semua pemerintahan di dunia sekarang untuk menjamin proses akumulasi kapital di dalam negeri masing-masing.

Pengalaman berbagai negara, termasuk Indonesia, menunjukkan betapa kehendak untuk merangsang proses akumulasi kapital dalam negeri telah mendorong banyak pemerintah nasional untuk mengintegrasikan diri ke dalam jaringan ekonomi-politik global. Ketika integrasi itu mensyaratkan penyesuaian berbagai praktek dan perilaku nasional dengan aturan main ekonomi-politik global yang kapitalistik, terjadilah perbenturan antara dua cara pengorganisasian kehidupan masyarakat modern. Yang pertama, yaitu kapitalisme, menekankan pada upaya pengorganisasian proses produksi pada skala dunia; sedangkan yang kedua, yaitu nasionalisme, mengutamakan pembentukan negara nasional yang kuat. Dari sudut pandang ini, sejarah Republik Indonesia bisa ditafsirkan sebagai sejarah pergulatan antara proyek pembinaan negara-bangsa yang kuat dan mandiri, dengan tujuan mengejar cita-cita kebangsaan, dengan kenyataan objektif berupa kekuatan struktural global yang kapitalistik.

Berikut ini akan diuraikan argumen pokok yang tersirat dalam kerangka konseptual di atas. Pertama, hendak dibahas secara ringkas agenda kerja politik luar negeri Indonesia sejak pertengahan 1960-an, yaitu sejak pemerintahan Orde Baru, untuk menunjukkan upaya pemerintah memanfaatkan hubungan internasional demi mencari penyelesaian atas persoalan politik dan ekonomi dalam negeri. Kedua, akan diajukan analisis mengenai karakteristik tantangan ekonomi-politik global yang dihadapi Indonesia sejak masa itu.



## Diplomasi Pembangunan

Terlahir dalam kondisi penuh ketidakpastian dan harus menghadapi tantangan politik maupun ekonomi yang gawat, para pemimpin Orde Baru muncul dengan agenda kerja pokok yang jelas, yaitu "state-building", membina kekuatan politik dan administratif yang efektif untuk menghadapi penantangannya di dalam maupun di luar negeri, yaitu para pendukung Orde Lama. Ini tentu saja bukan pekerjaan yang mudah, mengingat sampai akhir 1960-an medan politik belum sepenuhnya dikuasai, sedangkan penyelesaian secara konfrontatif dan dengan kekerasan dianggap tidak bisa menjanjikan keberhasilan karena masih besarnya kekuatan pendukung Orde Lama terutama di Jawa. Sementara kemampuan untuk persuasi sangat terbatas. Dalam perpolitikan normal, kemampuan persuasif bisa dimiliki bila pemerintah memiliki sumber daya yang cukup besar.

Upaya "state-building" juga memerlukan basis ekonomi yang kuat. Padahal tantangan dalam bidang ekonomi juga tidak kurang gawatnya. Ekonomi produksi mengalami kemerosotan akibat kelangkaan investasi baru, inflasi tidak terkendali, sedang hubungan ekonomi luar negeri diwarnai oleh hutang luar negeri yang untuk ukuran waktu itu sangat besar, dan defisit neraca pembayaran yang gawat. Para pemimpin baru itu juga memandang persoalan ekonomi itu hanya bisa diatasi kalau ada kesempatan untuk melakukan mobilisasi sumber daya baru.

Karena itu, sangat logis kalau politik luar negeri menjadi komponen strategis bagi upaya "state building" itu. Yaitu sebagai penjamin mobilisasi dukungan politik dari aktor-aktor utama dalam arena internasional dan bantuan sumber daya ekonomi bagi stabilisasi, rehabilitasi dan pembangunan ekonomi Indonesia. Agenda politik luar negeri itu juga sangat jelas, yaitu mengintegrasikan kembali Indonesia ke dalam sistem politik dan ekonomi internasional.

Misi diplomasi itu kemudian memang bukan hanya berhasil memasukkan kembali Indonesia menjadi anggota komunitas internasional tetapi juga membantu penyelesaian masalah ekonomi dan politik dalam negeri. "Diplomasi pembangunan" itu berhasil membantu menyelesaikan masalah kelangkaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dasar bagi rakyat serta barang kapital untuk investor, dan secara tidak langsung mempermudah penyelesaian masalah politik. Keberhasilan menyediakan kebutuhan materiil rakyat itu membuat kredibilitas para pemimpin baru meningkat dengan cepat dan dukungan rakyat semakin besar, sedangkan kekuatan para penantangannya semakin merosot. Kompetisi politik Orde Lama dan Orde Baru itu dimenangkan oleh yang kedua dengan cara membeli dukungan rakyat melalui pemberian kepuasan materiil. Demikianlah, politik luar negeri berfungsi sebagai

sarana untuk memenangkan kompetisi politik dalam negeri dan untuk menciptakan legitimasi bagi para pemimpin.

Tradisi memanfaatkan politik luar negeri sebagai bagian dari upaya penyelesaian persoalan politik dan ekonomi dalam negeri terus berlanjut pada pemerintahan pasca-Orde Baru. Agenda setiap presiden baru, termasuk Megawati, adalah menangani politik luar negeri secara langsung, demi menangani persoalan dalam negeri.

### **Dari Geopolitik ke "Geo-Ekonomik"?**

Pada masa awal Orde Baru, Indonesia menghadapi konteks internasional yang masih diwarnai oleh perang dingin dengan aturan main yang didasarkan pada pertimbangan geopolitik. Para pemimpin Orde Baru yang muncul sebagai kampiun antikomunisme memperoleh banyak simpati dari Blok Barat. Negara-negara industri maju itu memberi kesempatan bagi Indonesia untuk membuka kerja sama bilateral dan menjadi sponsor bagi masuknya Indonesia ke dalam lembaga-lembaga internasional, termasuk lembaga bantuan multilateral seperti IMF dan Bank Dunia. Kemudahan ini memungkinkan Indonesia memobilisasi sumber daya asing melalui bantuan, investasi maupun perdagangan internasional. Walaupun Indonesia memperoleh "rezeki nomplok" pada pertengahan 1970-an hubungan khusus dengan aktor-aktor dominan itu tetap diperlukan, karena dukungan negara-negara industri maju dan lembaga multilateral itu merupakan simbol kredibilitas Indonesia di kalangan komunitas bisnis internasional. Tanpa jaminan dari aktor-aktor utama dalam ekonomi-politik global itu, banyak investor dan pelaku ekonomi lain tidak akan bersedia melakukan bisnis dengan Indonesia.

Namun, sejak pertengahan 1970-an terjadi paling tidak dua hal yang membuat posisi Indonesia dalam kalkulasi geopolitik negara-negara besar itu berubah. Tahun 1975 Amerika Serikat (AS) keluar dari Vietnam. Doktrin Nixon yang memaksa negara-negara Asia Tenggara nonkomunis untuk mengurus keamanannya sendiri semakin ditekankan. Sampai pertengahan dasawarsa 1980-an, AS dan banyak negara industri maju lain mengalami resesi ekonomi yang sangat panjang dan menyakitkan. Dua kejadian ini tercermin dalam perubahan kebijakan pemerintah negara-negara industri maju dalam memberi bantuan. Warna geopolitik semakin mengabur, warna "geo-ekonomik" semakin tegas. Negara-negara maju itu, baik secara bilateral maupun melalui lembaga-lembaga multilateral yang didominasinya, semakin menegaskan peran pasar sebagai mekanisme alokasi sumber daya ekonomi dengan aturan main liberal. Salah satu

contoh adalah kegairahan AS dan anggota "Group of Seven" untuk melakukan reformasi rezim perdagangan internasional yang bisa menguntungkan mereka.

Sampai tahun 1970-an, kepentingan nasional AS terutama didasarkan pada pertimbangan geopolitik sebagai "hegemon". Kepentingan itu bisa dicapai dengan membantu banyak negara-negara nonkomunis untuk membangun ekonomi mereka dan membuka pasar AS yang kaya bagi ekspor mereka. Inilah dasar inisiatif pemerintahan Presiden Kennedy untuk memulai "The Kennedy Round" (1962 – 1967) dalam GATT. Ketika hegemoninya mulai merosot, yaitu pada masa antara 1970-an dan awal 1980-an, negara adidaya yang mulai melemah itu menolak tanggung jawab memimpin proses liberalisasi perdagangan internasional. Waktu itu AS justru menjadi pendorong merkantilisme. Baru ketika negara itu cukup yakin tentang keunggulan kompetitifnya yang sangat besar di bidang teknologi, jasa-berdasar-teknologi dan pertanian, pemerintahnya setuju untuk kembali memanfaatkan mekanisme GATT demi mengejar kepentingannya sendiri terutama dengan memaksa anggota-anggota lain untuk mematuhi rezim perdagangan internasional yang dicanangkan dalam "The Uruguay Round" (1986 – 1994). Kegairahan untuk menekankan fungsi mekanisme pasar dan mengistimewakan aktor dalam ekonomi pasar dalam hubungan ekonomi-politik internasional ini semakin menjadi-jadi ketika lawan utamanya, yaitu Uni Soviet dan sekutunya di Eropa Timur, mengalami kehancuran politik dan ekonomi sehingga terpaksa berganti haluan ideologi menjadi Russi dan CIS.

### **Kapital sebagai Panglima**

Mendasari kebijakan liberal itu adalah ideologi neokonservatif yang didukung dan disebarkan oleh negara-negara industri maju dan lembaga-lembaga multilateral yang didominasi mereka. Sejak 1980-an, ideologi itu mendominasi kebijakan ekonomi-makro berbagai negara di dunia ini dengan karakteristik sebagai berikut: [a] Anti-Keynesianisme, yaitu anti penggunaan APBN sebagai mekanisme alokasi sumber daya, proses produksi, dan distribusi; [b] Pro-Monetarisme, yaitu mendorong pelonggaran kendali terhadap mobilitas kapital swasta melalui deregulasi moneter; [c] Intensifikasi integrasi ekonomi nasional ke dalam sistem kapitalis global, yaitu liberalisasi perdagangan luar negeri dan industrialisasi berorientasi ekspor; [d] Menggalakkan aktor ekonomi swasta. Walaupun mungkin tidak dirancang, komponen terakhir itu telah menggalakkan konglomerasi usaha dengan konsentrasi dan diversifikasi tingkat tinggi. Bank Dunia dan IMF, di samping aktor-aktor ekonomi dominan lainnya, berusaha keras agar kebijakan itu dipatuhi oleh mereka yang menggunakan dana yang mereka kelola.

Komponen paling dinamis dalam rumus itu adalah kapital finansial. Karena mobilitasnya yang tinggi, sejak lama banyak negara berusaha membatasi perilaku kapital ini. Demi mempertahankan otonomi ekonominya, sebagian besar negara sampai akhir 1970-an berusaha mengendalikan volume likuiditas yang masuk maupun keluar wilayah yurisdiksi hukumnya. Tetapi sejak itu, banyak perubahan yang membuat kebijakan pengendalian lalu lintas kapital itu menjadi tidak efektif. Dua perubahan yang menonjol adalah: pertama, semakin agresifnya pembesaran pasar finansial internasional; dan kedua, semakin intensifnya globalisasi proses produksi. Menurut suatu sumber, dalam periode 1972 -- 1985 pasar finansial internasional mengalami transformasi dan pertumbuhan yang sangat cepat. Tingkat pertumbuhan rata-rata (*compound growth rate*) pasar perbankan internasional adalah 21,4% per tahun, pada hal GDP dunia hanya meningkat sebesar 10,9% per tahun dan perdagangan dunia hanya 12,7% per tahun. Kemajuan teknologi telah mempercepat transfer dana lintas-batas negara. Pertukaran mata uang di pasar devisa yang pada tahun 1973 hanya sebesar \$3 miliar per hari, pada akhir 1970-an meningkat menjadi \$100 miliar per hari dan pada akhir 1980-an mencapai \$650 miliar per hari. (Goodman dan Pauly, 1993: 57 -- 58). Sumber lain menunjukkan bahwa arus kapital keluar dari 13 negara industri maju: pada akhir 1970-an sebesar \$52 miliar, dengan dua-pertiga berwujud investasi asing langsung; sedang pada akhir 1980-an meningkat jadi \$444 miliar, dengan dua-pertiga berwujud investasi portofolio. Dipandang dari sudut proporsinya terhadap perdagangan barang di seluruh dunia, arus kapital keluar itu meningkat dari sebesar 7% pada akhir 1970-an menjadi 15% pada akhir 1980-an. Pinjaman bank internasional dan surat berharga yang pada tahun 1973 hanya \$200 miliar (= 5% GNP keseluruhan negara industri), pada tahun 1989 meningkat menjadi \$3,6 triliun (= 25% GNP keseluruhan negara industri). (Winters, 1994: 451). Sementara itu, dalam sektor produksi, konfigurasi bisnis juga semakin membuana. Perusahaan yang beroperasi multinasional pada awal 1970-an hanya beberapa ratusan; pada tahun 1990 jumlah itu jauh melebihi angka 1.000. Pendatang baru itu banyak yang berasal dari luar AS. Sementara itu, globalisasi terus berlangsung dalam sektor investasi asing langsung, yang sejak pertengahan 1980-an meningkat dengan 29% per tahun (Goodman dan Pauly, 1993: 56 -- 57).

Dalam perspektif pemerintah nasional, perilaku kekuatan kapital itu bisa sangat merepotkan. Pertama, para pemilik kapital punya kemampuan menghindarkan diri dari kendali pemerintah nasional. Kedua, mereka juga memiliki senjata yang sangat ampuh, yaitu "exit". Dengan struktur operasi yang multinasional, perusahaan-perusahaan itu bisa dengan mudah menghindar dari kendali

pemerintah nasional melalui mekanisme "transfer pricing" yang diterapkan dalam hubungan antar berbagai cabang dari perusahaan yang sama, yang beroperasi di berbagai negara. Dalam proses itu, perusahaan bisa mengatur transaksi antarbagian perusahaan yang tersebar di berbagai negara itu sedemikian rupa (misalnya dengan merubah harga transfer atau waktu pembayaran ke atau dari cabangnya di luar negeri) sehingga laporan keuntungannya hanya muncul dalam pembukuan di cabang perusahaan yang negara tuan rumahnya menetapkan tarif pajak paling ringan atau tidak mengenakan pajak sama sekali. Karena sebagian besar transaksi internasional berlangsung dalam perusahaan-perusahaan yang dikelola secara terpusat, baik dalam bentuk penjualan antarcabang atau antara induk dengan cabang, harga penjualan itu tidak ditentukan berdasar kekuatan pasar. Harga itu ditetapkan secara administratif, seperti halnya BULOG menetapkan harga beras. Selain itu, semakin meluasnya pasar kapital bisa memberi kesempatan perusahaan untuk menggunakan cabang-cabang perusahaannya di luar negeri untuk memperoleh atau meminjamkan dana di pasar modal luar negeri. Kalau dua cara menghindarkan diri dari kendali pemerintah itu dianggap tidak efektif, perusahaan-perusahaan multinasional itu masih memiliki senjata pamungkas, yaitu memindahkan usahanya ke luar negeri. "Exit" dalam wujud "capital flight" adalah senjata ampuh untuk menghadapi pemerintah nasional yang rewel (Goodman dan Pauly, 1993: 47; Winters, 1994: 450 - 451).

Yang menarik, tidak ada otoritas keuangan nasional yang sepenuhnya bisa mengendalikan perilaku kapital ini. Semua negara nasional tanpa kecuali mengalami kemerosotan otonomi nasional menyangkut pengendalian kapital. Karena itu, satu-per-satu berbagai pemerintah nasional di berbagai bagian dunia membatalkan kebijakan pengendalian kapital.

Yang juga menarik, pengaruh kapital yang begitu dominan telah menimbulkan fenomena ekonomi-politik baru dalam "state-building". Selama ini banyak yang percaya bahwa untuk membentuk negara yang kuat perlu landasan ekonomi yang kuat, terutama dalam bentuk industri manufaktur di dalam batas wilayah negara yang bersangkutan. Dengan globalisasi kapital itu, argumen yang "territorially-based" seperti itu kehilangan kredibilitas. Manufaktur dewasa ini bukan jenis industri yang paling penting. Yang lebih penting adalah usaha yang "padat-informasi," baik yang terkait dengan manufaktur atau tidak. Juga, apakah lokasi pabrik di dalam wilayah yurisdiksi negara sendiri juga tidak terlalu penting. Yang lebih penting adalah lokasi orang yang membuat keputusan kunci tentang apa yang akan diproduksi, di mana dan bagaimana; serta orang yang merancang, mengarahkan dan mengelola sehingga hasil produksinya sukses terjual di pasar dunia. Kekuasaan yang tidak punya basis teritorial semacam ini semakin penting dalam ekonomi-politik sehari-hari.

Karena itu, walaupun suatu negara mencatat prestasi bagus dalam kegiatan manufaktur, misalnya ditunjukkan oleh pangasanya dalam produksi barang manufaktur dunia atau oleh pangasanya dalam ekspor barang manufaktur, negara tersebut belum tentu menikmati hasilnya. Karena mungkin saja kegiatan itu dikendalikan oleh kekuatan kapital yang berdomisili di negeri lain. Dengan demikian, yang lebih penting adalah pangsa *output* (apakah itu barang produk primer, barang manufaktur maupun jasa) yang dikendalikan oleh para eksekutif perusahaan yang berasal dari negara tersebut. Sekali lagi, yang penting adalah lokasi para pengendali proses penciptaan *output*, bukan lokasi proses produksi itu.

Dalam kaitan ini, AS menduduki posisi dominan. Mengingat masih dominannya kegiatan inovatif di negara itu, akibat dari kegiatan R&D (*research and development*) yang besar, banyak proses produksi memakai teknologi yang hak ciptanya dipegang oleh perusahaan atau warga AS. Walaupun suatu perusahaan tidak dimiliki sepenuhnya oleh AS, atau bahkan sama sekali bukan milik AS, asalkan proses produksinya masih memerlukan lisensi yang dikuasai oleh warga AS, maka negara itu bisa ikut berpengaruh. Inilah yang oleh Susan Strange disebut "non-territorial structural power" (1994: 435 – 436).

Walaupun mungkin disajikan dengan cara yang terlalu dramatis, tetapi itulah konteks ekonomi-politik dunia yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Bagi negara yang sudah terlanjur mengandalkan keterlibatan dalam jaringan kapitalisme dunia sebagai cara menyelesaikan persoalan domestiknya, seperti Indonesia sejak pertengahan 1960-an, tidak terlalu salah untuk menyimpulkan bahwa konteks itu lebih banyak menjanjikan kendala daripada kesempatan. Proses akomodasi yang dilakukan untuk menangani kendala itulah yang mau tidak mau membuat pertimbangan "ideal-politik" di atas menjadi problematik.

### **Perspektif Ekonomi-Politik Internasional**

Bagaimana memahami konteks global itu? Apa dampaknya terhadap proses pembuatan keputusan domestik? Bagaimana seharusnya pemerintah dan rakyat Indonesia menanggapi, atau mengantisipasi, dampak dari fenomena global itu? Untuk menjawab pertanyaan seperti ini kita memerlukan perkakas analitis yang bisa diperoleh melalui penelaahan konseptualisasi, teorisasi dan hasil penelitian empirik yang telah diakumulasi oleh para ilmuwan ekonomi-politik internasional.

Buku yang sedang Anda baca ini merupakan pengantar bagus ke arah pemahaman itu. Ini adalah buku yang relatif langka di Indonesia. Sebuah buku teks

yang mengantarkan kita pada analisis bisnis, atau ekonomi internasional pada umumnya, melalui kerangka konseptual yang mencakup dimensi ekonomi, politik, sosiologi, bahkan di sana-sini tampak nuansa filsafat moral. Penulisnya adalah seorang ilmuwan muda yang cerdas, sangat serius, dan kritis terhadap bidang profesinya. (Ia mengajar Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Parahyangan, sesudah lulus dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Monash, dan Universitas Cambridge; semuanya dengan pujian tinggi). Asumsinya sangat tepat, yaitu bahwa bisnis, atau transaksi ekonomi pada umumnya, tidak terjadi dalam ruang kosong. Isinya sangat relevan untuk memahami persoalan yang dihadapi Indonesia seperti yang disebutkan di atas. Susunan kalimatnya lugas dan baku.

Selamat membaca.

\*

## REFERENSI

- Goodman, John B. dan Louis W. Pauly (1993). "The Obsolescence of Capital Controls? Economic Management in an Age of Global Markets", *World Politics*, Vol. 46, No. 1 (Oktober).
- Hatta, Mohammad (1988). *Mendayung Antara Dua Karang* (Jakarta: Bulan Bintang)
- Strange, Susan (1991). "The Future of the American Empire", dalam Richard Little dan Michael Smith (eds.), *Perspectives on World Politics* (London: Routledge).
- \_\_\_\_\_, (1994). "Rethinking Structural Change in the International Political Economy: States, Firms, and Diplomacy" dalam Richard Stubbs dan Geoffrey R.D. Underhill (eds.), *Political Economy and the Changing Global Order* (Toronto: M&S)
- Winters, Jeffrey A. (1994). "Power and the Control of Capital", *World Politics*, Vol. 46, No. 3 (April).
- \_\_\_\_\_, (1996). *Power in Motion* (Ithaca, NY: Cornell University Press).

# DAFTAR ISI



<b>Kata Pengantar</b> .....	5
<b>Pendahuluan</b> .....	19
<b>1. Politik Bisnis dalam Konteks Internasional</b> .....	25
Politik Bisnis sebagai Subkajian Hubungan Internasional .....	26
Pembagian Kerja Internasional .....	29
Konteks Historis dan Politis .....	33
Kompetisi Antarpelaku Bisnis Kontemporer .....	36
<b>2. Dimensi Kekuasaan, Struktur, dan Etika dalam Bisnis Internasional</b> .....	42
Pendekatan Kekuasaan .....	44
Pendekatan Struktural .....	49
Pendekatan Berorientasi Keadilan .....	52
<b>3. Politik Perdagangan Internasional: Dari GATT Menuju ke WTO</b> .....	56
Proteksionisme .....	58
Perdagangan Bebas .....	60
Hambatan-Hambatan Perdagangan .....	63
Negosiasi Perdagangan: Dari GATT Hingga WTO .....	69



<b>4. Politik Industrialisasi: ISI, IOE, dan Rezim Otoriter-Birokratis</b> .....	78
Kebijakan Industrial .....	80
Industrialisasi Substitusi Impor (ISI) .....	83
Industrialisasi Orientasi Ekspor (IOE) .....	86
Industrialisasi dan Kemunculan Rezim Otoriter-Birokratis (OB) .....	90
<b>5. Nuansa Kultural, Sosial, dan Politis dalam Dunia Kewirausahaan</b> .....	96
Mengidentifikasi Kaum "Entrepreneur" .....	97
Max Weber: Peran Etika Protestan .....	99
David McClelland: Dorongan untuk Berprestasi .....	102
Everett Hagen: Penurunan Derajat Sosial .....	105
Tugas Utama Kaum "Entrepreneur": Mengoperasikan Perusahaan secara Lebih Kompetitif .....	106
<b>6. Investasi Asing dan Perusahaan Multinasional</b> .....	112
Dinamika Struktur Perekonomian Global .....	113
Pengertian Perusahaan Multinasional (PMN) .....	117
Eksplanasi Profit (Keuntungan) .....	118
Eksplanasi "Daur Hidup Produk" .....	121
Eksplanasi Teknologi .....	124
<b>7. Pro dan Kontra terhadap Aktivitas Perusahaan Multinasional di Negara Berkembang</b> .....	133
Dukungan dan Kritik terhadap Kehadiran PMN .....	134
Perspektif Neo-Klasik .....	136
Perspektif "Global Reach" (Jangkauan Global) .....	137
Perspektif Neo-Imperialisme .....	139
Perspektif Neo-Fundamentalisme .....	141
PMN dan Negara Berkembang .....	142
<b>8. Negara Berkembang dan Sistem Pembagian Kerja Internasional Baru</b> .....	148
Relokasi Industri dan Sistem Pembagian Kerja Internasional Baru .....	149
Dampak Politik Sistem Pembagian Kerja Internasional Baru .....	157

<b>9. Dinamika Sistem Moneter Internasional</b> .....	161
Kebijakan dan Penetapan Nilai Tukar Mata Uang .....	163
Pasar Mata Uang Dunia, "Spot Rate" dan "Forward Rate" .....	171
Rezim-Rezim Moneter Dunia .....	174
Kebijakan Nilai Tukar dan Krisis Moneter Negara Berkembang .....	177
<b>10. Krisis Ekonomi Asia dan Peran IMF</b> .....	182
Memahami Krisis Ekonomi Asia .....	184
IMF sebagai Rezim Moneter Internasional .....	193
Implementasi Kebijakan <i>Structural Adjustment</i> (Penyesuaian Struktural) .....	199
IMF dan Krisis Asia .....	201
<b>11. Politik Bisnis dan Isu Lingkungan Hidup</b> .....	208
Degradasi Lingkungan sebagai Isu Global .....	209
Konsep Pembangunan Berkelanjutan ( <i>Sustainable Development</i> ) .....	217
Kepentingan Bisnis dalam Program Konservasi Lingkungan .....	220
Rezim Lingkungan Internasional .....	223
Referensi .....	228

# PENDAHULUAN

Buku ini mencoba untuk merefleksikan tema-tema yang paling sering muncul dalam konteks bisnis internasional, yakni persoalan di sekitar bagaimana para aktor bisnis internasional berupaya "mengontrol" pasar; bagaimana menetapkan harga yang tepat; bagaimana latar belakang sosiokultural kaum wirausaha; bagaimana memahami fenomena pertumbuhan dan krisis ekonomi sebagai suatu sekuensi; bagaimana kalangan bisnis mempersepsi persoalan degradasi lingkungan; dll.. Aktor, dalam konteks ini, meliputi negara, organisasi dan bahkan individu. Adakalanya mereka mempengaruhi struktur-struktur yang ada, tetapi ada pula masa di mana mereka dipengaruhi oleh struktur-struktur tersebut. Tujuan utama penulisan buku ini adalah untuk mengisi kekosongan literatur di dalam bisnis internasional yang membahas masalah kekuasaan, kebijakan, proses, aktor, dan struktur sebagai suatu kesatuan yang saling berinteraksi. Dengan demikian, buku ini mencoba memaparkan fenomena bisnis internasional dari perspektif ekonomi-politik makro.

Untuk memudahkan pembaca, pembahasan akan difokuskan pada tema-tema yang masing-masing akan dibahas secara mendetail pada setiap bab. Tema-tema tersebut adalah: (a) politik bisnis dalam konteks internasional; (b) dimensi kekuasaan, struktur, dan etika dalam bisnis internasional; (c) politik perdagangan internasional; (d) politik industrialisasi; (e) nuansa kultural, sosial, dan politis dalam dunia kewirausahaan (*entrepreneurship*) yang menjelaskan kemunculan kaum investor yang menjadi tulang punggung aktivitas bisnis internasional; (f) investasi asing dan perusahaan multinasional; (g) pelbagai perspektif yang mendasari pelbagai argumen pro dan kontra terhadap perusahaan multinasional;

(h) posisi negara berkembang dalam *New International Division of Labour* (sistem pembagian kerja internasional baru); (i) sistem moneter internasional; (j) krisis moneter di negara berkembang dan peran IMF; serta (k) masalah lingkungan hidup dan perburuhan. Tema-tema tersebut di atas diharapkan dapat mewakili pelbagai isu yang muncul di dalam konteks politik bisnis internasional dewasa ini.

Berdasarkan tema-tema tersebut, maka sistematika buku ini dibagi menjadi bab-bab berikut ini. Bab I akan mendiskusikan tentang perkembangan historis fenomena politik-bisnis dalam lingkup internasional. Pembahasan diawali dengan pemaparan posisi politik-bisnis sebagai salah satu subkajian disiplin Hubungan Internasional; dan diikuti dengan diskusi tentang sistem pembagian kerja internasional klasik yang lebih menguntungkan negara-negara maju. Bagian berikutnya membahas konteks historis dan politis sistem perekonomian dunia di mana para pelaku bisnis dipaksa untuk saling bersaing dalam hal membuka akses terhadap pasar, menetapkan harga produk yang sesuai, dan terus-menerus melakukan inovasi teknologi.

Bab II mencoba untuk membahas tiga macam pendekatan di dalam upaya untuk memahami fenomena politik bisnis internasional. Perspektif pertama menggunakan konsep kekuasaan — yang didefinisikan sebagai upaya suatu pihak untuk mengontrol pikiran dan tindakan pihak-pihak lain — sebagai unit analisis untuk memahami dinamika ekonomi internasional di mana pelbagai pihak terlibat di dalam transaksi bisnis. Perspektif kedua — yang diinspirasi oleh (walaupun tidak identik dengan) ajaran Marxis — menyatakan bahwa upaya memahami fenomena politik-ekonomi internasional dapat dilakukan dengan melihat pada "struktur" yang diwarnai oleh ketimpangan dan ketidakadilan. Menurut perspektif ini, fenomena politik ekonomi internasional penuh dengan upaya negara-negara perifer untuk memperjuangkan struktur yang lebih adil dan lebih menjamin kesetaraan. Perspektif ketiga memfokuskan pada pentingnya aspek etika moral di dalam bisnis. Bagi penganut perspektif ini adalah sudah waktunya bagi para pelaku bisnis internasional untuk lebih mempertimbangkan unsur *fairness* dalam upaya untuk mendistribusikan kesejahteraan bersama.

Bab III membahas tentang dinamika perdagangan internasional. Pertanyaan yang mendasar dalam perdagangan internasional adalah: Bagaimana negara harus menyikapi hubungan ekonomi antarbangsa yang mengandung ketimpangan? Kebijakan apa saja yang harus ditempuh suatu negara untuk memperoleh keuntungan maksimal dari perdagangan internasional? Para pakar ekonomi internasional pada umumnya menawarkan dua alternatif: "proteksionisme"

(yaitu membatasi arus masuk barang dari negara lain) atau "perdagangan bebas" (yaitu membuka seluas-luasnya pasar domestik bagi produk-produk asing). Masalah pemberlakuan pelbagai hambatan perdagangan (tarif maupun nontarif) juga akan dibahas dalam bab ini. Karena perdagangan internasional "diatur" oleh sebuah rezim, maka bab ini juga akan mendiskusikan beroperasinya rezim tersebut sejak dari GATT (*General Agreements on Tariffs and Trade*) hingga ke WTO (*World Trade Organization*).

Bab IV mendiskusikan tentang pelaksanaan pelbagai strategi industrialisasi yang dilakukan negara sedang berkembang untuk mengejar ketertinggalannya dari negara-negara industri maju. Negara-negara industri baru di kawasan Latin Amerika maupun Asia Timur dan Tenggara pada umumnya mengenal dua macam strategi industrialisasi dalam upaya untuk mengejar ketertinggalan mereka dari negara-negara maju, masing-masing adalah: (1) ISI (Industrialisasi Substitusi Impor), yakni upaya untuk mengganti sebagian dari produk-produk impor dengan produksi dalam negeri agar dapat mengurangi defisit neraca pembayaran; dan (2) IOE (Industrialisasi ber-Orientasi Ekspor), yakni upaya untuk mengakumulasi pendapatan dari penjualan produk-produk ke pasar internasional. Bab ini juga mencoba untuk melihat keterkaitan antara pengadopsian kedua strategi pembangunan di atas dengan perubahan struktur politik. Dengan merujuk pada pengalaman beberapa negara Amerika Latin serta Asia Timur dan Tenggara, bab ini mencoba untuk memberikan sebuah eksplanasi ekonomis terhadap kemunculan rezim-rezim OB (Otoriter-Birokratis) di negara-negara tersebut.

Bab V membahas tentang pelbagai nuansa kultural-spiritual, sosial dan politis yang mendasari kemunculan serta kiprah kaum wirausaha. Max Weber mengilustrasikan latar belakang kultural-spiritual dengan mengaitkan perilaku kewirausahaan dengan ajaran Protestan. Bagi Weber, semangat kerja keras, disiplin, dan akumulasi modal merupakan refleksi dari ajaran Protestan mengenai pola hidup orang Kristen yang ideal. David McClelland menggambarkan latar belakang sosiopsikologis bagi kemunculan kaum wirausaha. Bagi McClelland kaum *entrepreneur* dibentuk oleh *need for achievement* (kebutuhan berprestasi) yang direfleksikan dalam semangat kerja keras dan upaya untuk melakukan inovasi-inovasi. Sementara itu, Everett Hagen lebih melihat pada sisi sosial-politis kemunculan kaum *entrepreneur*. Menurut dia, kaum *entrepreneur* datang dari kalangan yang mengalami *withdrawal of status respect* (pelecehan martabat) akibat stigmatisasi atau stereotip yang dikembangkan oleh masyarakat di sekitarnya. Untuk mengkompensasi pelecehan martabat inilah mereka kemudian mengembangkan disiplin dan kerja keras sehingga terbentuk iklim kewirausahaan.

Bab VI menyoroiti tentang ekspansi perusahaan multinasional sebagai pembawa modal dan teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Ada sekurang-kurangnya tiga macam faktor yang dapat mengeksplanasi alasan ekspansi perusahaan multinasional ke negara-negara berkembang. Pertama, ekplanasi profit yang mengaitkan perluasan skala operasi perusahaan melampaui batas-batas negara dengan dorongan perusahaan untuk memperbesar perolehan keuntungan. Karena keterbatasan dan kejenuhan pasar di dalam negeri, maka banyak perusahaan yang memperbesar daerah operasinya ke negara-negara berkembang untuk "mengejar" upah buruh yang lebih rendah dan untuk "mendekati" pembeli secara langsung. Kedua, eksplanasi daur hidup produk yang mengaitkan operasi perusahaan dengan daur hidup suatu produk. Ketika sebuah produk memasuki tahap *obsolete* (kedaluwarsa) di mana hampir semua perusahaan menguasai teknologinya, maka perusahaan harus "membanting harga" sampai serendah-rendahnya. Untuk mengejar biaya produksi rendah, maka banyak perusahaan negara-negara maju terpaksa harus memindahkan pabriknya ke negara berkembang yang memiliki tingkat upah buruh lebih rendah. Ketiga, perusahaan multinasional kebanyakan disambut baik di negara-negara berkembang karena dianggap sebagai aktor penting dalam proses transfer teknologi. Kebanyakan negara berkembang bersedia menerima kehadiran perusahaan multinasional dengan harapan untuk memperoleh teknologi baru.

Bab VII mendiskusikan tentang perspektif-perspektif utama dalam pelbagai literatur ekonomi yang mendasari sikap pro dan kontra terhadap kehadiran perusahaan multinasional. Pembahasan akan memfokuskan pada empat macam perspektif: (1) Neo-Klasik yang pada dasarnya membenarkan beroperasinya perusahaan multinasional karena dapat mengoptimalisasi beroperasinya mekanisme pasar di negara-negara berkembang; (2) *global-reach* (jangkauan global) yang menganggap kehadiran perusahaan multinasional dapat membahayakan perekonomian negara berkembang karena menciptakan pelbagai distorsi; (3) Neo-Imperialisme yang menganggap ekspansi perusahaan multinasional sebagai bentuk dari Neo-Imperialisme sehingga kehadiran mereka harus ditolak negara-negara berkembang; dan (4) Neo-Fundamentalisme yang memandang kehadiran perusahaan multinasional secara positif karena dalam jangka panjang dapat mendorong perusahaan-perusahaan lokal untuk berproduksi secara lebih kompetitif dan efisien.

Bab VIII mencoba untuk membahas perubahan posisi negara berkembang di dalam transaksi bisnis internasional sebagai akibat dari terjadinya sistem *New International Division of Labour* (NIDL) atau pembagian kerja internasional baru di mana negara-negara berkembang mulai berperan sebagai produsen

barang manufaktur di pasar internasional. NIDL terjadi akibat arus relokasi industri sejak akhir 1970-an, di mana perusahaan-perusahaan besar berangsur-angsur memindahkan pabrik mereka ke negara-negara berkembang. Pendekatan Neo-Smithian menjelaskan bahwa proses relokasi industri ini didorong oleh tersedianya tenaga kerja terampil dan semiterampil di negara-negara berkembang yang diperlukan bagi produk-produk *labour-intensive* (misalnya tekstil, pakaian jadi, elektronik, mainan anak-anak, dll.). Sementara itu pendekatan Neo-Ricardian menekankan pada perbedaan upah buruh antara negara maju dengan negara berkembang yang cukup jauh sehingga perusahaan-perusahaan berkepentingan untuk memindahkan pabriknya ke negara-negara dengan upah buruh rendah demi untuk mengejar keuntungan.

Bab IX menyoroti tentang sistem pertukaran mata uang internasional. Pembahasan akan difokuskan pada upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: Apa signifikansi sistem moneter bagi perekonomian dunia? Bagaimana nilai tukar antarnegara ditetapkan? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nilai tukar mata uang? Bagaimana keterkaitan kebijakan nilai tukar dengan krisis moneter yang melanda beberapa negara berkembang?

Bab X membahas tentang krisis neraca pembayaran yang dialami oleh negara-negara sedang berkembang dan peran lembaga keuangan internasional — yakni IMF — dalam berupaya untuk mengatasi krisis tersebut. Krisis neraca pembayaran — yang kemudian berdampak pada krisis mata uang — merupakan persoalan aktual yang dialami banyak negara berkembang pada dekade 1990-an. Untuk mencegah agar krisis tersebut tidak mengganggu stabilitas perekonomian dunia, IMF melakukan tindakan *shock therapy* terhadap negara-negara yang mengalami krisis. Bab ini mencoba mendeskripsikan terjadinya krisis neraca pembayaran dan upaya IMF untuk memberlakukan *conditionality* (persyaratan perubahan kebijakan ekonomi) bagi negara-negara calon penerima bantuan IMF. Dalam paket kebijakan yang lazim dikenal dengan istilah SAP (*Structural Adjustment Programme*), IMF mewajibkan negara-negara penerima bantuan untuk melakukan sejumlah kebijakan yang meliputi: pemotongan anggaran negara, pemberlakuan nilai tukar mengambang, liberalisasi perdagangan, pengurangan subsidi, dan likuidasi terhadap perusahaan-perusahaan yang dianggap tidak efisien.

Bab XI mencoba untuk mengetengahkan isu lingkungan hidup yang merupakan isu baru di dalam praktek bisnis internasional. Beberapa tahun terakhir ini isu lingkungan "diangkat" sebagai masalah global. Dipelopori oleh pelbagai organisasi nonpemerintah (NGOs) internasional, gelombang tekanan diarahkan kepada para pelaku bisnis untuk lebih memperhatikan konservasi lingkungan.

Dalam pelbagai kasus, kiprah bisnis sering kali dikaitkan dengan sejauh mana pihak perusahaan memiliki komitmen terhadap konservasi lingkungan. Salah satu keberhasilan lobi kelompok bisnis di dalam forum internasional adalah upaya untuk mempengaruhi agenda manajemen lingkungan di dalam KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, pada tahun 1992, di mana agenda konferensi dapat dimodifikasi sedemikian rupa untuk tidak terlalu memberatkan para pelaku bisnis.

\*





1

# **POLITIK BISNIS DALAM KONTEKS INTERNASIONAL**

**B**ab ini mencoba untuk mengelaborasi dinamika politik bisnis internasional dengan memfokuskan pada beberapa bahasan. Bagian pertama memaparkan posisi "politik bisnis" sebagai salah satu subkajian dalam disiplin Hubungan Internasional. Persoalan yang paling dominan dalam "politik bisnis" adalah menyangkut penafsiran yang berbeda mengenai apakah fenomena hubungan ekonomi internasional merupakan sesuatu yang dapat diprediksi dan apakah negara merupakan aktor penting dalam transaksi bisnis antarnegara. Bagian kedua melihat sistem pembagian kerja internasional yang melahirkan sebuah ketimpangan sistemik di mana negara-negara maju berkonsentrasi pada produk-produk manufaktur dengan nilai tambah yang besar, sementara negara berkembang berkonsentrasi pada produksi bahan mentah dengan nilai tambah kecil. Bagian ketiga membahas konteks historis dan politis sistem perekonomian dunia dengan memfokuskan pada interaksi antara unsur-unsur *state* (negara), *market* (pasar), *power* (kekuasaan), dan *plenty* (kemakmuran). Keempat unsur tersebut merupakan tema-tema klasik yang mendominasi wacana politik bisnis internasional, karena sangat mempengaruhi proses, struktur dan institusi ekonomi internasional.

### **Politik Bisnis sebagai Subkajian Hubungan Internasional**

Disiplin ilmu yang paling berambisi untuk membahas aspek politik dari bisnis internasional adalah Hubungan Internasional (HI). Sebagai suatu bidang studi, HI menetapkan batas-batas yang tidak terlalu jelas tentang apa saja yang dicakup sebagai pokok bahasan. Ada yang berpendapat bahwa HI mempelajari fenomena politik internasional yang meliputi keputusan-keputusan yang dibuat oleh negara untuk mempengaruhi negara-negara lain (Goldstein, 1996: 5). Lingkup bahasan politik internasional itu sendiri mencakup pelbagai aktivitas seperti peperangan,

diplomasi, perdagangan, aliansi, pertukaran budaya, partisipasi dalam lembaga-lembaga internasional, pembentukan kelompok ekonomi regional, dan sebagainya.

Disiplin HI membahas politik bisnis di dalam rubrik Politik Ekonomi Internasional (PEI) yang muncul sebagai subdisiplin sejak dekade 1970-an dan 1980-an. Terminologi PEI itu sendiri diperkenalkan oleh para pakar hubungan internasional seperti Joan Spero, Susan Strange, Robert Gilpin, dan lain-lain. Sementara itu subkajian "politik bisnis internasional" termasuk dalam lingkup PEI. Sub-bahasan ini mencoba untuk mengisi kekosongan dalam literatur PEI yang membahas fenomena bisnis internasional dari kacamata politik. Telah banyak publikasi yang membahas bisnis internasional, tetapi belum banyak yang mencoba menjelaskannya dari kacamata politik, di mana faktor *power* (kekuasaan) dan *structure* (struktur) dianggap sebagai faktor-faktor penting yang mempengaruhi perilaku aktor-aktor negara dan nonnegara (seperti kelompok bisnis, lembaga keuangan internasional, rezim internasional, dll.) dalam melakukan transaksi bisnis antarbangsa dan antarwilayah.

Beberapa pakar mencoba mendefinisikan istilah "politik ekonomi" untuk memberikan justifikasi konseptual bagi studi tentang konsekuensi politis dari fenomena ekonomi. Tokoh-tokoh ekonomi seperti Gary Becker, Anthony Downs, dan Bruno Frey mendefinisikan "politik ekonomi" sebagai aplikasi teori-teori ekonomi untuk menjelaskan perilaku sosial-politik individu, kelompok, organisasi maupun negara. Sedangkan Robert Gilpin (1987) dan Roger Tooze (1984) mendefinisikan "politik ekonomi" sebagai suatu subdisiplin yang membahas tentang interaksi antara pelbagai aktivitas politik dan ekonomi dengan menggunakan pelbagai paradigma, perspektif, teori, dan metode yang diambil dari disiplin ilmu politik dan ilmu ekonomi. Pada awalnya, PEI memfokuskan pada dinamika hubungan antarnegara maju dan pelbagai organisasi internasional di belahan bumi bagian utara; namun sejak dekade 1990-an, hubungan antara negara maju dengan negara miskin, dan bahkan hubungan antarnegara miskin di belahan bumi bagian selatan pun mulai menjadi pusat perhatian. Setidaknya ada dua hal yang membuat para pakar mulai memperhatikan dinamika politik-ekonomi di negara berkembang. Pertama, krisis finansial di negara-negara berkembang sejak awal dekade 1980-an yang mengakibatkan resesi ekonomi pada skala global. Kedua, pertumbuhan ekonomi pesat yang dicapai beberapa negara industri baru di kawasan Asia Timorseperti Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, dan Singapura telah menciptakan dinamika baru dalam transaksi bisnis antar-negara yang menarik perhatian para pakar.

Ada perbedaan-perbedaan mendasar dalam cara orang memandang fenomena bisnis internasional. Beberapa pakar yang menggabungkan HI dengan PEI seperti Robert Gilpin, Robert Keohane, John G. Ruggie, dan Stephen Krasner mendasarkan analisis mereka pada perspektif liberalisme yang menyatakan bahwa transaksi bisnis antarbangsa hanya dapat berjalan di bawah sistem pasar bebas (*free market*), keterbukaan dan prinsip nondiskriminasi. Sebagaimana dikatakan Robert Gilpin (1987: 172): "... perdagangan bebas cenderung menciptakan perdamaian dunia karena saling ketergantungan ekonomi dapat menciptakan hubungan-hubungan positif antarbangsa yang pada gilirannya mengembangkan harmoni kepentingan ...."

Pandangan semacam ini membangkitkan kritik dari pakar HI di luar kubu liberal, terutama Robert Cox dan Stephen Gill. Dengan merujuk pada teori pemikir Marxis Italia, Antonio Gramsci, Cox (1987) menyatakan bahwa fenomena ekonomi dan bisnis internasional seharusnya tidak dipahami sebagai sekuensi dari pelbagai peristiwa rutin dengan hasil akhir yang bisa diprediksi, melainkan dilihat sebagai suatu gabungan dari pelbagai hubungan sosial (kelas, etnis, regional, dll.) yang membentuk struktur-struktur tertentu dengan pola yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Maka, unit analisis yang dipakai dalam melihat transaksi bisnis antarbangsa seharusnya bukanlah negara sebagai suatu kesatuan, melainkan "agency" yang terdiri dari konsumen, produsen, perusahaan, kelompok kepentingan, buruh, dan lain-lain (Gill, 1993: 24). Lebih jauh lagi, para pengkritik liberalisme menyatakan sangat ironis jika kaum liberal memiliki keyakinan sempit bahwa sistem perdagangan bebas hanya dapat dipertahankan di bawah kekuatan hegemonis suatu negara yang dapat memaksa negara-negara lain untuk mematuhi standar aturan tertentu.

Kritik lain datang dari Andre G. Frank dan Barry K. Gills (1996) yang mempertanyakan validitas proposisi teoretis kaum liberal yang hanya merujuk pada fakta-fakta selama 500 tahun ke belakang. Bagi mereka, sejarah sistem kapitalisme dunia sesungguhnya bermula sejak 5000 tahun yang lalu, jauh sebelum peradaban Eropa (atau Barat) mendominasi dunia. Sejak sekitar 3000 SM, sistem dunia divarnai oleh dua fenomena penting: "ekspansi" dan "krisis" yang datang silih berganti. Pada saat itu, bersamaan dengan munculnya zaman perunggu, hubungan antarbangsa telah terjalin di bawah hegemoni kerajaan Mesopotamia yang daerah pengaruhnya meliputi pelbagai kota niaga penting seperti Mari, Ebla, Elam, Lagash, Ur, Nippur, Kish, Uruk, dan Akkad (Frank dan Gills, 1996: 152). Jika rentangan sejarah perekonomian dunia dibentangkan sejauh 5000 tahun, maka — menurut Frank dan Gills — akan teridentifikasi proses eksploitasi, peperangan, serta kekerasan yang menjadi ciri khas dan sekaligus faktor pendorong bagi proses ekspansi perekonomian dunia.

## Pembagian Kerja Internasional

Terlepas dari perdebatan apakah perekonomian dunia harus liberal atau tidak; dan juga apakah sejarah sistem kapitalisme dunia bermula dari 500 atau 5000 tahun yang lalu, fakta menunjukkan bahwa peningkatan besar-besaran transaksi bisnis antarbangsa yang terjadi sejak abad pertengahan berlangsung ketika institusi-institusi sosial yang mengatur dan mengelola aktivitas komersial mulai berkembang. Karl Polanyi (1957: 71) menyebutkan bahwa proses reproduksi material berkembang pesat ketika sistem pembagian kerja (*division of labour*) mulai diperkenalkan. Dalam mekanisme pasar, misalnya, pembagian kerja terjadi antara produsen dan konsumen. Produsen menjual barang maupun jasa untuk memperoleh alat pembayaran bagi kebutuhan hidup dan pengembangan usahanya; sedangkan konsumen membeli barang sesuai dengan kebutuhan dan daya belinya. Hubungan transaksional ini ditentukan oleh harga barang atau jasa yang disepakati bersama dalam sebuah mekanisme pasar.

Dalam konteks perekonomian dunia, sistem pembagian kerja diatur sedemikian rupa di mana negara-negara maju di belahan bumi bagian utara berkonsentrasi pada produksi barang-barang industri berat yang padat modal dan teknologi; sementara negara-negara miskin di belahan bumi bagian selatan memproduksi bahan-bahan mentah, produk pertanian atau industri ringan. Persoalan mulai muncul ketika negara-negara mulai merasakan bahwa nilai tambah barang-barang berteknologi canggih jauh lebih besar daripada bahan-bahan mentah, produk pertanian maupun industri ringan. Akibatnya, terjadi kesenjangan tingkat pendapatan nasional (*national income*) yang cukup signifikan antara negara-negara maju dan negara-negara miskin. Dalam laporannya, *Human Development Report* (1999) yang dipublikasi oleh UNDP (*United Nations Development Programme*) menyatakan bahwa pada tahun 1999 negara-negara industri maju (yang didiami oleh 22,9 persen penduduk dunia) menikmati 84,2 persen dari total GNP (*Gross National Product*) dunia; sementara negara-negara berkembang (yang didiami oleh 77,1 persen penduduk dunia) menikmati 15,8 persen total GNP dunia.

Situasi semacam ini berlangsung dalam jangka waktu cukup lama. Seorang ahli sejarah ekonomi, Paul Bairoch (1975), melakukan estimasi bahwa sejak tahun 1860 rasio pendapatan per kapita antara negara-negara miskin dengan negara-negara maju semakin membesar dari 1:5 pada tahun 1860 menjadi 1:6 pada tahun 1900, 1:7 pada tahun 1929, 1:8,5 pada tahun 1953, dan 1:13 pada tahun 1970. Ankie Hoogvelt menambahkan estimasi Bairoch menjadi 1:18 pada tahun 1990 (Hoogvelt, 1997: 85). Data-data tersebut menunjukkan bahwa sistem pembagian kerja internasional yang berlaku sejak ratusan tahun yang lalu